

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdoellah, A. Y. Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. In *Alfabeta Bandung* (p. 135).
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku%20Kebijakan%20Publik%20REV%2015%20nov.pdf)
- Chaniago, A. (2017). Pemimpin dan kepemimpinan. In *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Vol. 10, Issue 9).
- Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue March).
- Hermawati, W., Achmad, S., Handayani, T., Simamora, N. G., Akbar, M., Suharta, H., Sintawardani, N., Nilawati, D., Ushijima, K., Noveria, M., Latifa, A., Amelia, M., Laksani, C. S., Carolina, Sriharjo, S., Pranoto, A., Irwanti, A., Dharmanto, S., Maludin, S., & Luhulima, A. S. (2018). *Gender dalam Ilmu Pengetahuan an Teknologi: Perkembangan, Kebijakan, & Tantangannya di Indonesia*.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*.
- Khusnaeny, A. (2015). *Menggugah Komitmen Perlindungan Negara Terhadap Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*.
- Mukarom, Z. (2016). *Komunikasi Politik*.
- Pulu, L., Herlina, L., & Nielson, C. (2015). *STANDAR MINIMAL AKUNTABILITAS LSM* (Issue 11).
- Suketi, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2016). *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*. 1–59.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant*.
- Tachjan. (2006). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK* (D. M. dan C. Paskarina (ed.)). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo

JURNAL :

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Anggraeni, A. P., & Ardianto, H. T. (2020). Bagaimana Polisi Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus Polrestabas Semarang. *Ijd-Demos*, 2(3), 258–270. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.68>
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75.
- Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016). Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Penanganan Anak Jalanan Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*, 423–436.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006>
- Elita Inas Putrihartiwi, Amiek Soemarmi, S. A. G. P. (2017). Indonesia sebagai negara hukum yang Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Terhadap men. *Diponegoro Law Journal*, 6, 1–15. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
- Frismai Anggit Purnaningsiwi, Sundarso, A. R. J. (2014). Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. *Jurnal Administrasi Publik*, 6.
- Hardiyanti, M., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2019). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Irawati, M. A. (2015). Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Semarang. *Natapraja*, 3(2). <https://doi.org/10.21831/jnp.v3i2.11968>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*.
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Nafisah, S. (2017). Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di PPT

- Seruni Kota Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 211.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3), 8–13.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori dan Analisa Gender. *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia.*, 4(Zeitlin 1995), 1–16.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Satriani, B. Y. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1–13.
- Sudaryanto, S., & Wibawa, Y. S. (2013). Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini. *Jurnal Riset Geologi Dan Pertambangan*, 23(1), 27.
- Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 17(2), 195–214.
- Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Journal of Anthropology*, 1(1), 29–42.
- Rizkiani, L. A., & Wardono, P. (2014). Perancangan Fasilitas Rehabilitasi Mental Untuk Penderita. *Jurnal Tingkat Sarjana Bidang Seni Rupa Dan Desain, ITB Bandung*, 3.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 30–35.
- Sidauruk, P. L. (2013). Peranan Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Study Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatik*, 3(1), 81–113.
- Sudaryanto, S., & Wibawa, Y. S. (2013). Sejarah Perkembangan Kota Semarang (Jawa Tengah) di Masa Lalu dan Dampak Kehadiran Polutan Nitrat Pada Airtanah di Masa Kini. *Jurnal Riset Geologi Dan Pertambangan*, 23(1), 27.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016. Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

SITUS RESMI :

Website Resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>
Badan Pusat Statistik. (2020). *Kota Semarang Dalam 2020*.
Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Semarang Dalam Angka 2021*.
Pemkot Semarang. (2018). *PROFIL KOTA SEMARANG*.
LBH APIK SEMARANG. (2021). *LBH APIK SEMARANG*.
<https://lbhapiksemarang.blogspot.com/>
LRC-KJHAM KOTA SEMARANG. (2020). *LRC-KJHAM KOTA SEMARANG*.
<https://lrckjham.id/>

INTERNET :

Soekendro, H. (2020). *Kasus Kekerasan Perempuan di Jateng Tertinggi, Dewan Prioritaskan Raperda*. [Www.Suaramerdeka.Com](http://www.suaramerdeka.com).
<https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/233091-kasus-kekerasan-perempuan-di-jateng-tertinggi-dewan-prioritaskan-raperda>

DOKUMEN PENDUKUNG :

LKJIP DP3A. (2020). *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG*.
LKPJ WALIKOTA SEMARANG. (2020). *LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2020*. 270–281.
RENSTRA DP3A. (2017). *RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021*